

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan dipandang sebagai suatu sarana untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia suatu bangsa. Bangsa yang maju adalah bangsa yang peduli akan pendidikan dan dapat tergambarkan dari pencapaian pendidikan warga negaranya. Pencapaian pendidikan suatu bangsa dapat dilihat dari kesesuaian antara tujuan dan keterlaksanaan pendidikan. Di Indonesia, menurut pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Adapun fungsi nasional pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan merupakan kebutuhan penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Pendidikan selalu mengalami perubahan, perkembangan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan di segala bidang kehidupan. Perubahan dan perbaikan dalam bidang pendidikan meliputi berbagai komponen yang terlibat di dalamnya baik itu pelaksana pendidikan di lapangan (kompetensi guru dan kualitas tenaga pendidik), mutu pendidikan, perangkat kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan dan mutu manajemen pendidikan termasuk perubahan dalam metode dan strategi pembelajaran yang lebih inovatif. Upaya perubahan dan perbaikan tersebut bertujuan membawa kualitas pendidikan Indonesia lebih baik.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Pemerintah Dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Salah satu peran negara dalam hal tersebut adalah dengan memberikan atau meringankan biaya pendidikan di Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjelaskan bahwa secara garis besar biaya pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

Dana Pendidikan merupakan salah satu komponen Masukan Instrumental (Instrumental Input) yang sangat penting dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah. Sumber-sumber Dana Pendidikan di antaranya Pemerintah Pusat (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)), Pemerintah Daerah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), Sumbangan, dan Orang Tua Siswa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat 1 yaitu “Dana Pendidikan selain gaji Pendidik dan biaya Pendidikan Kedinasan di alokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Sektor Pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”. Salah satu bentuk Pendanaan Pendidikan Dasar yang signifikan dari Sumber Dana Anggaran Pendapatan Belanja (APBD Propinsi) Adalah Dana Bantuan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

Salah satu hal yang tidak dapat dilupakan dalam mencapai tujuan pendidikan suatu bangsa adalah peran negara dalam menyediakan sarana pendidikan. Lingkungan dan sarana pendidikan merupakan sumber yang dapat menentukan kualitas serta

berlangsungnya usaha pendidikan. Lingkungan tersebut dapat bersifat lingkungan fisik, sosial dan budaya yang semuanya memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap usaha pendidikan. Belum memadainya tempat pendidikan (gedung sekolah, sarana olahraga dan rekreasi), perlengkapan, alat pendidikan, materi pendidikan, kurangnya kerjasama antara berbagai lembaga dalam masyarakat, rendahnya pendidikan penduduk serta biaya pendidikan yang relatif mahal pada umumnya dapat menghambat berlangsungnya pendidikan dengan baik.¹

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan adalah pengelolaan dana, salah satunya adalah dana Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) yang menyokong pelaksanaan Pendidikan di sekolah. Pentingnya pengelolaan dana yaitu, dengan pengelolaan yang baik akan mampu membantu ketercapaian tujuan pendidikan dengan efektif dan efisien. Pengelolaan dana Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) yang baik melalui suatu proses kerjasama yang sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi. Dalam merencanakan penggunaan dana Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) kepala sekolah dan jajaran pimpinan terlebih dahulu menyesuaikan dengan Rencana Kerja Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS (Bantuan Operasional Sekolah) karena dana Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) digunakan untuk pengelolaan yang tidak dapat didanai oleh dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, peneliti ingin mengungkapkan tentang Peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Biaya Penunjang Operasional

¹ Dwi Siswoyo, dkk. 2013. Ilmu Pendidikan. Yogyakarta: UNY Press

Penyelenggaraan Pendidikan di SMA Negeri Jogoroto dan SMA A Wahid Hasyim Tebuireng.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan di SMA Negeri Jogoroto dan SMA A Wahid Hasyim Tebuireng?
2. Bagaimana Peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan di SMA Negeri Jogoroto dan SMA A Wahid Hasyim Tebuireng?

C. Identifikasi Masalah Penelitian

Pelaksanaan aspek penggunaan Dana Bantuan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di SMA Negeri Jogoroto dan SMA A Wahid Hasyim Tebuireng memiliki aturan dalam penggunaannya, penjelasan secara rinci dalam penggunaan dana juga terdapat larangannya. SMA Negeri Jogoroto dan SMA A Wahid Hasyim Tebuireng telah menggunakan dana sesuai peraturan teknis Dana Bantuan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan di SMA Negeri Jogoroto dan SMA A Wahid Hasyim Tebuireng

2. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan di SMA Negeri Jogoroto dan SMA A Wahid Hasyim Tebuireng

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti dan pembaca, untuk menambah pengetahuan mengenai Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
2. Bagi pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan sistem yang telah ada
3. Bagi sekolah, agar lebih mengetahui pemanfaatan program tersebut dengan baik

BAB II

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Kerangka Dasar Teori

1. Peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Peranan Program Nawa Bhakti Satya yang ke tiga yaitu Jatim Cerdas dan Sehat yang dengan penyediaan pendanaan biaya penunjang perasional personalia dan nonpersonalia bagi SMA dan SMK Negeri dan Swasta yang bersumber dari dana APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sasaran BPOPP diberikan kepada SMA, SMK dan sekolah khusus yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.